

**PENGARUH PENDAPATAN REGIONAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN
HALMAHERATIMUR**

**Nurhaida Hi. Rustam¹, Bakri Soamole, SE., M. Si², Muhammad Zais
M. Samiun, SE., M.Si³**

¹Lulusan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Khairun

Email: haidarstm@gmail.com

^{2,3} Dosen Ekonomi Pembangunan FEB-Unkhair

bakrisoamole@gmail.com; zaisms@Unkhair.ac.id

Abstrak: **Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmhera Timur.** (Dibawa bimbingan Bapak Amran Husen dan Bapak Daud Hasim) Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Timur (2) Untuk menganalisis pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Timur (3) Untuk menganalisis pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Timur (4) Untuk menganalisis pengaruh DBH terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Timur.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (4) Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kata Kunci: PAD, DAU, DAK, DBH dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode jel : O47

Jejak artikel :
Diterima : 17 mei 2022
Direvisi : 24 mei 2022
Disetujui : 10 April 2022
Tersedia Online : 30 April 2022

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Karakteristik negara yang sedang berkembang menurut Todaro dan Smith (2003) yaitu standar hidup yang relatif rendah, tingkat produktivitas yang rendah, tingkat pertumbuhan penduduk serta beban ketergantungan yang tinggi, ketergantungan pendapatan yang sangat besar kepada produksi sektor pertanian serta ekspor produk-produk primer (bahan-bahan mentah), pasar tidak sempurna dan terbatasnya informasi yang tersedia, dan dominasi, ketergantungan, dan kerapuhan yang parah pada hampir semua aspek hubungan internasional.

Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diprosikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yaitu total atas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di kesenjangan daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan.

Wahyuni dan Sukarsa (2014) Setiap daerah dalam melaksanakan pembangunannya mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Berhasil tidaknya pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya konsumsi akibat adanya pendapatan yang meningkat.

Pada kenyataannya di lapangan tidak pernah tercapai pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebabkan beberapa hal antara lain masalah-masalah internal seperti adanya kesenjangan antar manusia, kesenjangan antar daerah dan kesenjangan ekonomi, sedangkan masalah eksternal misalnya persaingan antar wilayah, baik antar wilayah regional maupun nasional.

Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi, mengu daerah, dan meningkatkan pelayanan publik (Andirf (2009).

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga mampu meningkatkan PAD. PAD adalah sumber penerimaan utama bagi suatu daerah. PAD yang diperoleh suatu daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

serta lain-lain PAD yang sah Olatunji et al. (2009) mengatakan bahwa pendapatan pemerintah daerah terutama berasal dari pajak. PAD menjadi tulang punggung yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Liliana et al (2011) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan pendapatan pemerintah sangat kuat berkorelasi dengan pengeluaran pemerintah. Penelitian oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Tuasikal (2008) memperoleh hasil bahwa PAD dan belanja modal memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat. Selain itu, Ogujiuba dan Abraham (2012) yang melakukan penelitian di Nigeria juga memperoleh hasil bahwa pendapatan dan pengeluaran sangat berkorelasi.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2010). Todaro (2000) mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai ikaitan erat dengan perubahan struktural dan sektoral yang tinggi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggalipotensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2006).

Brata (2004) menyatakan bahwa terdapat komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yaitu PAD. Apabila peningkatan PAD. Apabila peningkatan PAD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka terdapat kemungkinan dana alokasi dapat umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena nilai DAU dan DAK pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD. Pemerintah mendorong mengeluarkan danaperimbangan berupakan alokasi umum untuk mengatasi ketimpangan infrastrukturyang ada pada setiap daerah agar terciptanyapertumbuhanekonomi yang merata. Tabel: 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Timur Dalam Angka (Miliar) Tahun 2015-2020

Tahun	PAD	DAU	DAK	DBH	PE
2015	22.133.826.820,00	386.052.045.000,00	96.626.850.000,00	68.966.286.556,00	6,11
2016	25.176.739.490,00	479.291.000.000,00	141.961.000.000,00	83.725.254.343,00	5,5

PENDAPATAN REGIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

2017	53.541.053.118,00	476.515.982.000,00	208.334.271.304,00	33.662.390.363,00	7,17
2018	66.676.603.419,92	476.196.126.000,00	99.237.813.589,00	45.006.944.238,00	8
2019	55.120.233.297,00	486.927.206.000,00	177.195.175.852,00	44.725.239.119,00	5,6
2020	21.602.268.181,00	448.081.887.000,00	155.095.042.315,00	55.166.693.170,00	0,57

Sumber Data: BPS Halmahera Timur.

I. Berdasarkan Tabel 1.1 Pada tahun 2015 dan 2017 pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomise besar 6.11% pada tahun 2015 dan di tahun 2017 sebesar 7,17% dibandingkan di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Halmahera Timur mengalami penurunan 5,5%, pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 8% di tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 5,6% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan 0,57%. Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan di tahun 2020 diakibatkan penurunan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah KAJIAN PUSTAKA

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah, yang menambah kekayaan dan lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah Kabupaten Halmahera Timur Dalam Angka (PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan).

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Dimana dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 telah meletakkan perubahan yang fundamental dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi, dari yang semula didominasi oleh pusat kemudian bergeser dengan memberikan kelulusan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan tanggung jawab untuk memberdayakan diri terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber dana yang dimilikinya untuk pembiayaan daerah.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh PAD pada belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat

meningkatkan PAD dan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan perberdampak pada peningkatan pendapatan perkapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan membuat penerimaan PAD semakin tinggi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah sehingga sumber-sumber PAD terutama yang berasal dari pajak daerah akan semakin meningkat. PAD yang tinggi selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal. Penelitian oleh Taiwo dan Abayomi (2011) memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat dan disertai dengan pendapatan daerah yang semakin tinggi, maka semestinya mampu meningkatkan belanja modal suatu daerah. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses ini, karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurung waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisis sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya (Husenda Sun' an, 2018).

Kemajuan perekonomian suatu Negara dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh suatu Negara dalam satu tahun. Sumber daya alam, kualitas tenaga kerja, kepemilikan modal fisik dan kemajuan teknologi merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas modal manusia (*humancapital*) menjadikan tenaga kerja lebih produktif karena dengan ilmu pengetahuan tenaga kerja bias mengembangkan teknologi yang ada dan mengerti cara penggunaan teknologi atau sumber daya lainnya supaya lebih efektif dan efisien. Keunggulan dalam modal manusia ini dapat dicapai melalui investasi di bidang pendidikan yang akan menambah pengetahuan, keterampilan dan keahlian modal manusia. Peningkatan modal fisik selain modal manusia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah.

PAD merupakan salah satu sum PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu (Tambunan, 2006). Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2003). Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Sidik (2002) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan berpembelanjaan daerah, jika kesejahteraan masyarakat di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah (Yovita, 2011).

4. Dana Alokasi Umum(DAU)

Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim 2009). Menurut Halim (2009) ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal, disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah.

Gunantar (2014) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud yaitu: (i) Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, seperti kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer, dan (ii) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Dana Alokasi Umum yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004 pasal 11 angka 21). Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

5. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dll.

Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran Kementerian Negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup (Sulistiyowati 2011).

Dana Alokasi Khusus itu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Tahun 2004 pasal 11 angka nasional (Tahun 2004 pasal 11 angka UU 23), dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Hubungan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pengalokasian DAK lebih difokuskan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Berbeda dengan DAU, pemanfaatan DAK oleh daerah tidaklah fleksibel dan leluasa tetapi harus mengikuti berbagai regulasi dari pemerintah pusat. Dengan fokus alokasi kepada belanja fisik sarana dan prasarana infrastruktur, aset tetap hasil belanja DAK akan menjadi modal dasar bagi masyarakat di daerah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas ekonomi yang mengarahkan pada peningkatan output dan kesejahteraan masyarakat.

6. Dana Bagi Hasil (DBH)

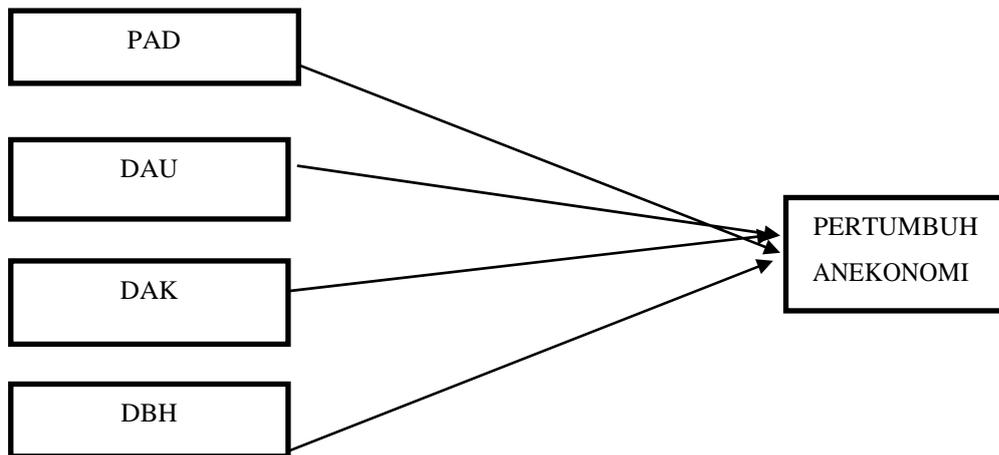
Dana ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi (UUNo. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). DBH yang pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak Sumber Daya Alam (Wahyuni&Adi2009).

Dana ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ditransfer.

7. KerangkaBerpikir

Gambar2.1
KerangkaBerpikir



III. METODOLOGI

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk bilangan atau angka, sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data sekunder yang merupa dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Halmhera Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dan menggunakan data publikasi yang diperoleh dari Instansi, seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Timur dan instansi lainnya yang terkait. dan membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk mengaitkan antara teori-teori dengan sumber-sumber data yang didapat.

Mode analisis Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menghubungkan satu variabel terikat dengan beberapa variabel

bebas. Persamaan regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu, pendapatan regional dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten halmahera timur. Data yang diteliti terjadi perbedaan satuan maka diperlukan ditransformasikan kedalam bentuk logaritma berganda dengan menggunakan logaritma natural (Ln). Sebagai berikut (Gujarati, 1991).

$$\text{Ln}Y = \alpha + \beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_2 \text{Ln}X_2 + \beta_3 \text{Ln}X_3 + e$$

Keterangan:

Y: Variabel Terikat (pertumbuhan ekonomi)

α : Interc

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi

X_1 : PAD

X_2 : DAU

X_3 : DAK

X_4 : DBH

e: (Standard error)

Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression), maka dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Metode yang baik yang layak digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kolmogorovsmirnov* untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Uji *kolmogorovsmirnov* adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (terjadi korelasi di antara variabel independen). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dan *residual* satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

5. Uji Statistik

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual (parsial) dan bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji statistik meliputi Uji t , Uji F dan Uji Koefisien determinasi (R^2)

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kemampuan faktor-faktor produksi yang merangsang bagi berkembangnya ekonomi daerah dalam skala yang lebih besar. Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah setelah mulai diterapkannya otonomi daerah tingkat kabupaten/kota, diharapkan pembangunan di daerah dapat lebih mendorong pemerataan pembangunan, dan juga memajukan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan berdampak pada semakin cepat pemulihan meningkatnya pendapatan penduduk yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan harga dari tahun ke tahun, menyebabkan PDRB berdasarkan harga berlaku juga turut berubah-ubah setiap tahunnya. Oleh karena itu, PDRB berdasarkan harga berlaku tidak dapat memberikan gambaran tentang perubahan daya beli masyarakat. Untuk melihat kenaikan produksi suatu wilayah digunakanlah PDRB harga konstan. Kenaikan produksi ini disebut pertumbuhan ekonomi. Kenaikan nilai PDRB atas dasar harga konstan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi bernilai positif (meningkat), demikian pula sebaliknya. 51 Perkembangan pertumbuhan ekonomi pada

Kabupaten Halmahera Timur dalam pengamatan dari tahun 2015-2020 terus mengalami peningkatan

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kondisi data yang digunakan dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar diperoleh model analisis yangtepat. Model analisis regresi linear penelitian ini mensyaratkan uji asumsi terhadap data yang meliputi:

Tabel 4.6 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test
Uns tandar dized
Res idual

N	6
Norm al Param eter sMean a,b	,0000000
	Std. Deviation
	,74202070
Mos t Extrem e Difference S	Abs olute ,196
	Pos itive ,133
	Negative -,196
Tes t Statis tic	,196
As ym p. Sig. (2-tailed)	,200c,d

Tes t dis tribution is Norm al.
Calculated from data.
Lilliefors Significance Correction.
This is a lower bound of the true s ignificance.

Sumber: Data diolah 2021

Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)*diperoleh0, 20 maka signifikan variabel lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat variabel X yakni PAD, DAU, DAK.

1. UjiMultikolinearitas

Tabel4.7UjiMultikolinearitas

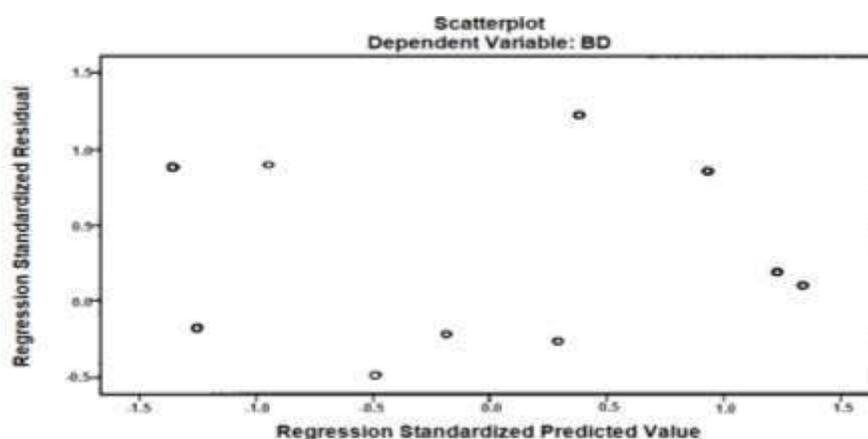
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	,099	10,141
	DAU	,217	4,605
	DAK	,288	3,467
	DBH	,150	6,671

a. Dependent Variable: PE

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan hasil Uji Multikolonieritas pada tabel4.2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu PAD, DAU, DBH dan DAK mempunyai hipotesis nilai *tolance* diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10, sehingga dapat disimpulkan regresi pada penelitian ini tidak terjadi adanya multikolonieritas.

1. UjiHeterokedastisitas



Berdasarkan gambar diatas, maka dapat disimpulkan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- Jika tidak ada pola tertentu,sepertititik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heterokedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelassertatitik-titikmenyebardiatas dan dibawah angka 0pada sumbu Y, maka tidakterjadiheterokedastisitas

Gambar diatas tidak ada pola yang jelas dan menandakan tidak terjadi heterokedastisitas untuk variabel penelitian kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap penggunaan sistem, sehingga asumsi dasar bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan terpenuhi dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

2. UjiHipotesis

UjiParsial(Ujit)

Tabel4.9UjiParsial(Uji-t)

Variabel	Koefisien RegresiB	t hitung	Sig.
Konstanta	-1,787	-0,107	0,919
PAD	6,747	,615	,004
DAU	67,346	2,798	,003
DBH	-198,389	-1,876	,004
DAK	35,261	1,237	,000
Fhitung	70,310	1,988	
RSquare	0,983		
R	0,991		

Sumber:Datasekunderyangdiolah,2021

Hasil analisis tabel 4.9 tersebut dapat ditulis dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

- Nilai konstanta adalah -1,787 artinya jika PAD, DAU, DBH dan DAK bernilai -1, Maka PE memiliki konstanta negatif yaitu -1,787.
- Koefisien regresi pada variabel PAD didapat bernilai positif sebesar 0,615 maka hipotesis dinyatakan diterima. Berarti hasil penelitian variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap PE
- Koefisien regresi pada variabel DAU didapat bernilai positif sebesar 2,798 maka hipotesis tersebut dinyatakan diterima. Hasil penelitian ini berarti variabel DAU

berpengaruh signifikan terhadap PE

- Koefisien regresi pada variabel DAK didapat bernilai positif sebesar 1,237 maka hipotesis tersebut dinyatakan diterima. Hasil penelitian ini berarti variabel DBH berpengaruh signifikan terhadap PE
- Koefisien regresi pada variabel DBH didapat bernilai negatif sebesar -1,876 maka hipotesis tersebut dinyatakan diterima. Hasil penelitian ini berarti variabel DBH berpengaruh signifikan terhadap PE
- **Uji F (Simultan)**

Tabel 4.10 Hasil Uji

Simultan (Uji F) ANOVA^a

ANOVA^a

Model	Sum of Squares			
Df	Mean Square	F	Sig.	
1		Regression		
Residual				
30,961	4	7,740	72,391	,000 ^b
2,753	1	2,753		
a. Dependent Variable: PE				
Total	33,713	5		
b. Predictors: (Constant), DBH, DAU, DAK, PAD				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji signifikan simultan (Uji F) di atas menunjukkan pengaruh PAD, DAU, DBH dan DAK secara simultan terhadap PE yaitu sebesar $0,000 < 0,05$, dan nilai F sebesar 72,391 lebih besar dari F_{tabel} yaitu sebesar 72,391. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa penelitian dapat diterima yang artinya terdapat pengaruh PAD, DAU, DBH dan DAK terhadap PE secara simultan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan pertama diperoleh bukti empiris dengan hasil yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara logika sederhana, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sendirinya meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah. Menurut UU Nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah, dan penerimaan lain-lain. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah yang baik serta diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut. Sesuai dengan hasil penelitian di atas, maka semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah yang benar maka akan semakin besar Pertumbuhan Ekonomi, dengan demikian maka hipotesis pertama diterima

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 85 desentralisasi (PP No. 55 Tahun 2005). Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah dan merupakan konsekuensi penyerahan kewenangan pusat terhadap daerah. Transfer ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik atau pelayanan lain. Dana Alokasi Umum dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat atau block grant yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang

tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup dari pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Annora Azzahra (2015) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011-2012, yang menyatakan bahwa secara parsial/individu Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Nilai koefisien variabel Dana Alokasi Khusus Kabupaten Halmahera Timur sebesar 1,237 dengan signifikansi sebesar 0,000

$< \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya setiap kenaikan dana alokasi khusus sebesar Rp. 1Juta maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Timur sebesar 0,702%. Secara empiris setiap kenaikan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.96 miliar maka berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Timur sebesar 6,11%.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Permasari (2013) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil ini sejalan dengan teori yang ada dimana didalam teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, dana alokasi khusus dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi karena merupakan suatu bentuk investasi dari pemerintah yang nantinya dapat menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Bagi Hasil digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara tingkat pemerintahan dengan cara meratakan kemampuan fiskal antar pemerintah daerah guna mengacu belanja daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang

berdampak pada pembangunan nasional, pencapaian infrastruktur public, dan memacu pendapatan daerah. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2013) dan Dewi (2015) yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan penelitian tersebut, hipotesis penelitian yang dihasilkan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

III. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menunjukkan nilai positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Secara simultan PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Timur
3. Secara Parsial PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Timur.
4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa memediasi hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

B. Saran

Berdasar hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian diatas maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi maka pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara Intensifikasi maupun Ekstensifikasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga bisa menjadi daerah yang mandiri dan secara perlahan bisa melepaskan ketergantungan dari pemerintah pusat

1. Pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan

Kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, sehingga dapat menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Pemerintah daerah Diharapkan mampu mengelola dengan baik Dana Alokasi Umum (DAU) agar Pertumbuhan Ekonomi setiap periodenya bisa bertambah

3. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dengan baik Dana Alokasi Khusus (DAK) agar Pertumbuhan Ekonomi setiap periodenya bisa digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

4. Bagi peneliti selanjutnya agar mengambil populasi selain kabupaten Halmahera Timur dan menambah variabel penelitian yang lebih lengkap dan bervariasi. Penambahan variabel independen lain, baik ukuran-ukuran atau jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variable non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

Adyatma, Erdi. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*. Vol.4, No.2, hal 190-205.

Andirfa, Mulia, 2009, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Pemerintah Aceh)", *Skripsi*, Banda Aceh: FE Universitas Syiah Kuala Darussalam.

(http://iurnalak.hlosspot.com/2009/i_2/pengaruh-pertumbuhan-ekonomipendapatan.html).

Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pemba

ngunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram.

Arwati dan Hadiati. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013* (SEMANTIK2013).

Arwati, D., Hadiati, N. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *JURNAL SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI TERAPAN*.

Bastian, Indra. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Boediono. 1985. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE

BPS Kabupaten Halmahera Timur (2020). Kabupaten Halmahera Timur Dalam Angka Tahun (2015-2020).

Brata, Aloysius Gunadi. 2004. Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Damang, 2011. Pendapatan Asli Daerah. Artikel. <http://www.pendapatan-asli-daerah-negara-hukum.com>. Diakses pada 4 Januari 2013. Pukul 21.00

Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum

Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal .*Simposium Nasional Akuntansi X*, Makasar,26-28Juli2007.

Gunantara, Putu Candra dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi DiBali.e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.3

Gunantara, Putu Candra dan A.A.N.B. Dwirandra. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi diBali. *E-JurnalAkuntansiUnud7.3(2014):529-546.*

Halim, Abdul. 2001 .*Analisis Diskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota diJawa Tengah.* KOMPAK. STIEYO.Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi. Salemba Empat: Jakarta.

Harahap, Alfian. 2010. —Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota diSumatera Utaral. *Skripsi.UniversitasSumateraUtara.*

Harahap, Riva Ubar.2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara. *Tesis. SekolahPascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.*

Harianto, David & Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan PerKapitall .*Simposium Nasional AkuntansiXMakasar26-28Juli 2007.*

- Hasan, T.I.B. (2012).
Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penduduk Miskin di Aceh. *Journal SAINSRiset*, 1(1).
- Husen, A., Sun'an, M. 2018. Efek Dari Pendapatan Regional Terhadap
127 Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol VI No.2.
- Ikhlas, Saily. 2011. *Dana Alokasi Khusus dalam pembiayaan pembangunan* .<http://www.blogger.sailyikhlas.com>. Diakses pada 6 januari 2013. Pukul 20.50.
- Jaya dan Dwirandra. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.1(2014):79-92
- Jaya, Iputu Ngurah Panji K., Dwirandra, A. A.N.B. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, hal 79-92.
- Supply, and Government Revenues?. *International Journal of Arts & Sciences*, pp:241-254.
- Maryati, Ulfi dan Endrawati. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, vol 5, No.2, Desember 2010.
- Muliana. 2009. *Pengaruh Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota Di Sumatera Utara*, Skripsi USU: Medan.

Putri, T. D. dan Toto G. 2015. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Perkembangan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2000—2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.4, No.3:301—326.

Putro, Nugroho S. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Rahmawati, Nur Indah. 2010.—Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ririn, Gurning. 2011. Tugas Dana Alokasi Umum dan Laporan Realisasi Anggaran. <http://www.edublogs.riringurning.com>. Diakses pada 4 Januari 2013. Pukul 20.30.

Santosa, Budi. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. Universitas Trisakti Jakarta.

Santosa, Budi. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. Universitas Trisakti Jakarta.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Otonomi*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

- Sianipar, Eva Septriani. 2011. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Development. *European Journal of Business and Management*,3(9).
- Tambunan, Tulus. 2006. *Upaya-Upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah*.
www.kardin-indonesia.or.id
- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ketujuh Jilid1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tuasikal, Askam. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*,1(2),h:142-155.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Wahyunidan Priyo Hari Adi. 2009. Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Se Jawa-Bali)ll. *National Conference UKWMS Surabaya*.
- Wahyuni, I Gusti Ayu Putri, Sukarsa, M., Yuliarmi, Nyoman. 2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008